

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut (Sadono Sukirno, 2003) kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Dalam literatur klasik, terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, terutama menurut teori Keynes dan teori klasik tradisional (Nopirin, 2000).

Adapun yang dimaksud dengan kebijakan fiskal (*fiscal policy*) atau disebut juga kebijakan anggaran (*budgetary policy*) menurut Muana Nanga (2005) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) yang ditujukan untuk memengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian.

Menurut Mankiw (2003) dan Turnovsky (1981) kebijakan fiskal memiliki dua **instrumen pokok**, yaitu :

1. Perpajakan (*tax policy*) dan
2. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)

Lebih jauh Soediyono (1985) mengatakan bahwa variabel instrumen dari kebijakan fiskal dapat berupa pajak (*tax*), transfer pemerintah (*government transfer*), subsidi (*subsidies*) dan pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Secara umum, subsidi ini bertujuan untuk menambah output, permintaan dan produktivitas serta menjaga stabilitas perekonomian, khususnya stabilitas harga.

Dalam Sadono Sukirno (2004), pajak yang di terima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari perbelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya adalah : jumlah pajak

yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima. Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.
2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut sering sekali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Untuk mengatasi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, misalnya pemerintah perlu membiayai pembangunan infrastruktur- irigasi, jalan-jalan, pelabuhan dan pengembangan pendidikan.
3. Pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Pada prinsipnya Keynes berpendapat bahwa kebijakan fiskal lebih besar pengaruhnya terhadap output daripada kebijakan moneter. Hal ini didasarkan atas pendapatnya bahwa, pertama elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga kecil sekali (extrim-nya nol) sehingga kurva IS tegak. Kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva IS kekanan sehingga output meningkat. Sedangkan ekspansi moneter dengan penambahan jumlah uang beredar pada kurva IS yang tetap tidak akan berpengaruh terhadap output. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal akan lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan moneter.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Sedangkan menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat

sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo, 2009).

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan output total (*GDP*) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecendrungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses interen perekonomian (*self generating*) (Wijono, 2002).

Pertumbuhan ekonomi ini biasanya berhubungan erat dengan kenaikan atau peningkatan produksi barang dan jasa. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota (Susanti, 2000).

Menurut (Gatot Dwi Adiatmojo, 2003) dalam “Pembangunan berkelanjutan dengan optimasi pemanfaatan sumber daya alam untuk membangun perekonomian dengan basis pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin”

menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Menurut (H. Saberan, 2002) Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu: Pertama; Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa, kedua; domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan, ketiga; regional; artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan, dan keempat; bruto, maksudnya adalah perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah diatas, maka arti PDRB adalah sebagai nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun. PDRB dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Domestik Regional Bruto. Dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa jumlah nilai produksi merupakan jumlah pendapatan yang sekaligus juga jumlah pengeluaran. Pertama; PDRB dari sisi pendapatan artinya jumlah pendapatan ini merupakan komponen-komponen nilai tambah yaitu: upah/gaji, sewa tanah, dan keuntungan usaha, dan kedua; PDRB dari sisi pengeluaran merupakan jumlah seluruh pengeluaran baik oleh rumah tangga,

pemerintah maupun lembaga (non profit) termasuk pengeluaran yang merupakan pembentukan.

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

3. Inflasi

Inflasi merupakan ketidakstabilan harga yang dapat menyebabkan perekonomian tidak stabil. Definisi inflasi banyak ragamnya seperti yang dapat kita temukan dalam literatur ekonomi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus, Sukirno (2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000).

Kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase yang sama. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus menerus dan kenaikan harga yang terjadi pada seluruh kelompok barang dan jasa (Pohan, 2008). Bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi, (Nopirin, 2000).

Menurut Keynes dalam *The General Theory of Employment, Interest and Money*, dinyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara kemampuan ekonomi masyarakat terhadap keinginan-keinginannya terhadap barang-barang (Shapiro, 2002) Pengertian inflasi yang lain yaitu tingkat harga agregat naik atau inflasi adalah keadaan dimana harga barang pada umumnya mengalami kenaikan terutama disebabkan karena penawaran akan uang jauh melebihi permintaan akan uang. Inflasi yaitu kenaikan harga secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah (Mishkin, 2008).

Dari banyak pengertian inflasi, terdapat kesamaan prinsip bahwa inflasi merupakan suatu fenomena atau dilema ekonomi. Ada tiga aspek yang tercakup di dalam pengertian inflasi tersebut:

1. Adanya kecenderungan (*tendency*) harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat
2. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus (*sustained*) yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja, akan tetapi bisa beberapa waktu lamanya.
3. Mencakup pengertian tingkat harga umum (*general level of prices*), yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja, akan tetapi untuk harga-harga secara umum.

Inflasi terjadi karena jumlah uang yang diedarkan melebihi jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat sehingga terdapat kelebihan dana di masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Jika harga umum mengalami kenaikan, maka daya beli masyarakat menjadi berkurang karena

pendapatan riil masyarakat yang turun. Turunnya daya beli masyarakat suatu negara menggambarkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

A) Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi menjadi (Nopirin, 1992) :

- Inflasi merayap (*creeping inflation*)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

- Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

- Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

B) Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya :

1. Demand Pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*). Sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan Inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya *inflationary gap*.

2. Cost Push Inflation

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi. Serikat buruh yang menuntut kenaikan upah, manajer dalam pasar monopolistis yang dapat menentukan harga (yang lebih tinggi), atau kenaikan harga bahan baku, misalnya krisis minyak adalah faktor yang dapat menaikkan biaya produksi, atau terjadi penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Jika proses ini berlangsung terus maka timbul *cost push inflation*.

4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori

mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan

air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

5. Teori Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Terciptanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan (high rates and sustained economic growth) dianggap merupakan tujuan makroekonomi yang amat penting dan menjadi prakondisi bagi tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan makroekonomi yang lainnya. Dalam istilah populernya, pertumbuhan ekonomi sering disebut sebagai suatu syarat perlu (necessary condition), walaupun bukan merupakan syarat cukup (sufficient condition) (Muana Nanga, 2001). Pengeluaran pemerintah dapat mencerminkan suatu kebijakan

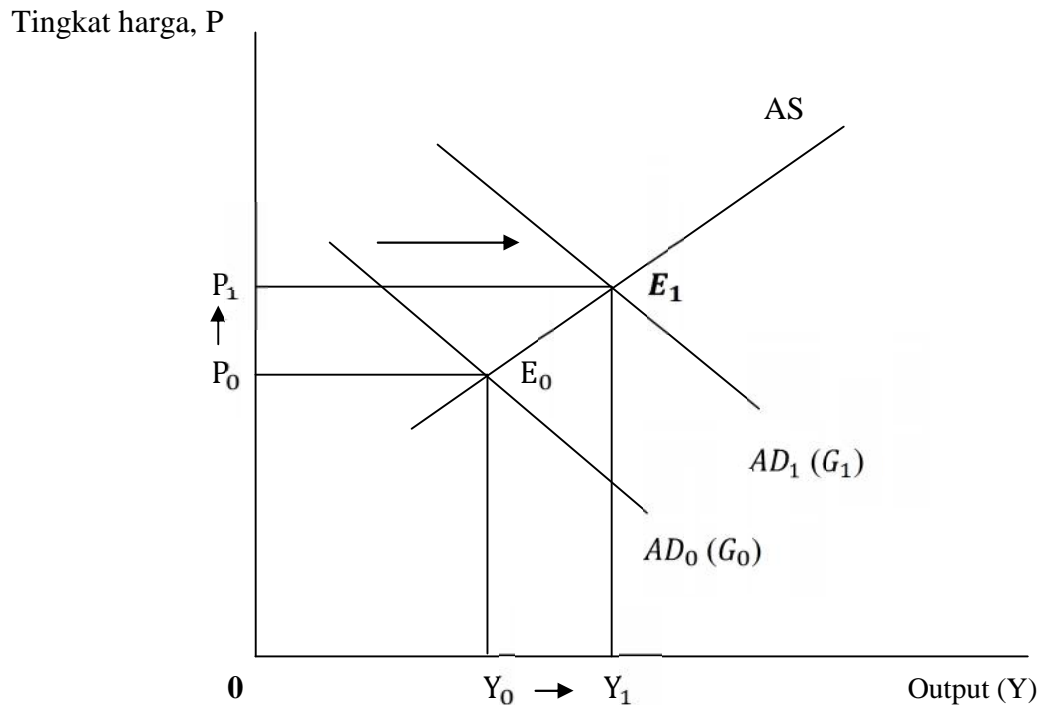
pemerintah. Ketika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2001).

Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Keynes, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mengatasi resesi ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan menaikkan belanja pemerintah di ikuti dengan pemotongan pajak, dengan begitu akan memstimulus pasar barang dan meningkatkan output nasional (Berto Muharman, 2013).

Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya kenaikan pengeluaran, maka permintaan agregat (AD) akan naik, atau dalam kerangka model AS-AD akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan. Dengan kurva AS yang tertentu maka bergesernya kurva AD ke kanan, akan menyebabkan baik tingkat harga (P) maupun tingkat pendapatan (Y)

mengalami kenaikan. Adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap output dapat dilihat pada gambar 1 :

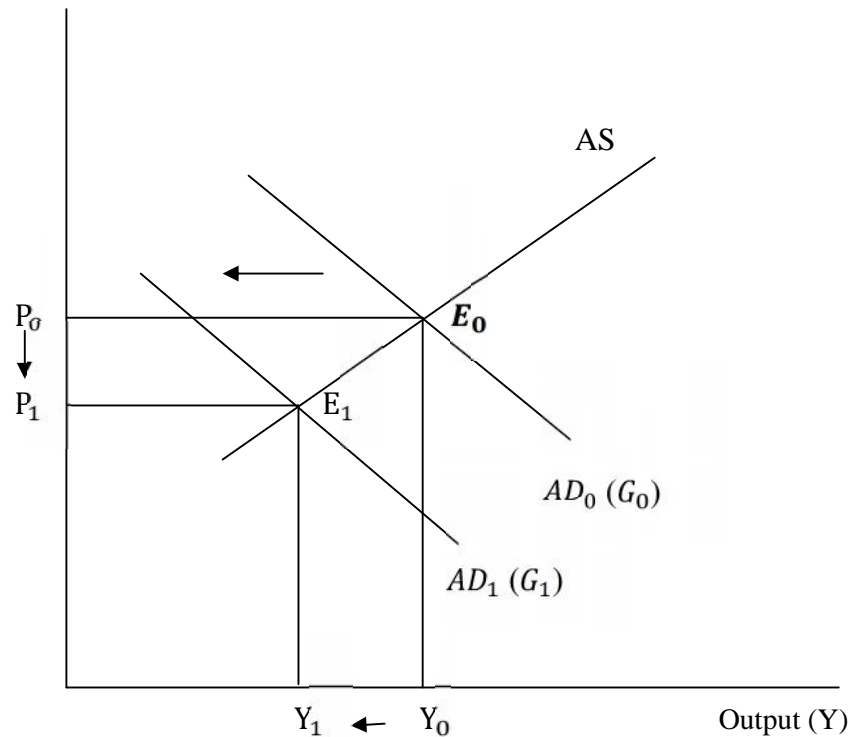


Gambar 1. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model AD-AS

Kenaikan pengeluaran pemerintah dari (G_0) ke (G_1) telah menyebabkan kurva AD bergeser dari $AD_0 (G_0)$ ke $AD_1 (G_1)$, yang selanjutnya menyebabkan baik tingkat output (Y) maupun tingkat harga (P) naik masing-masing dari Y_0 ke Y_1 dan P_0 ke P_1 . Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif yaitu pemerintah menurunkan pengeluarannya (G), artinya pemerintah melakukan suatu kebijakan fiskal menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan tingkat pajak. Dengan turunnya pengeluaran pemerintah (G), maka dengan asumsi ceteris paribus, hal ini akan menyebabkan permintaan agregat turun (AD), atau kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Dengan kurva penawaran agregat (AS) yang tertentu, maka bergesernya kurva AD ke kiri akan mengakibatkan baik tingkat harga (P) maupun

tingkat pendapatan (Y) mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 :

Tingkat harga, P

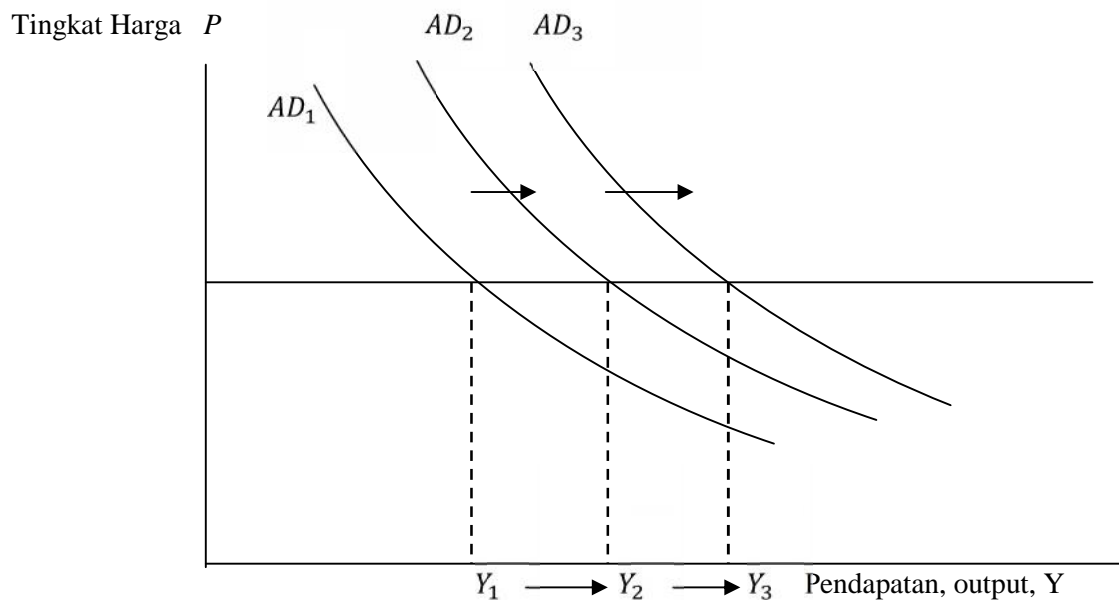


Sumber : (Muana Nanga, 2001)

Gambar 2. Kebijakan Fiskal Kontraktif dalam Model AD-AS

Teori permintaan agregat dari Keynes mencoba mencari pola hubungan antara kebijakan fiskal terhadap output nasional. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Model permintaan agregat yang merupakan interpretasi terkemuka dari teori Keynes disebut model IS-LM. Tujuan dari model tersebut adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3, dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap,

pergeseran kurva permintaan agregat menyebabkan perubahan pendapatan nasional.



Gambar 3 : Pergeseran Permintaan Agregat

Untuk tingkat harga tertentu, pendapatan nasional berfluktuasi karena pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Model IS-LM menggunakan tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Model tersebut menunjukkan apa yang menyebabkan permintaan agregat bergeser. Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga serta tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa.

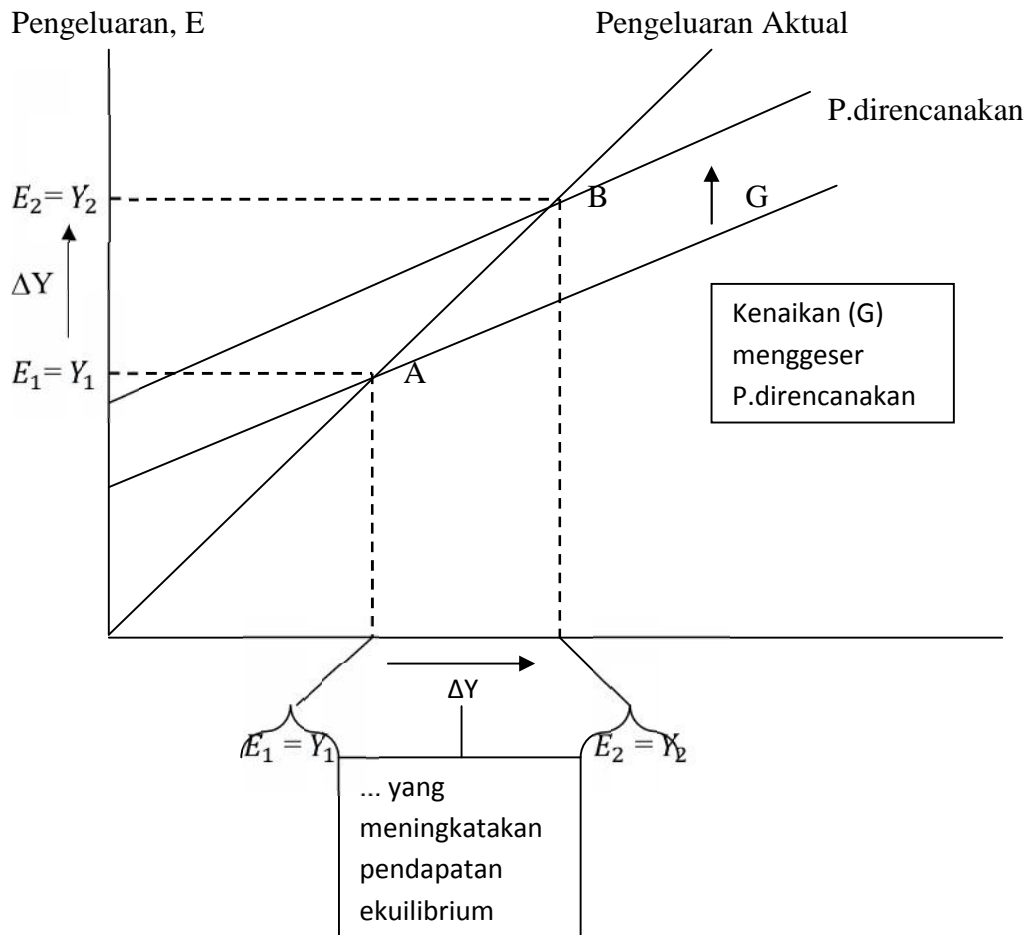
Dalam *The General Theory*, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian, dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan

menjual, semakin banyak output yang akan mereka produksi dan semakin banyak pekerja yang akan di karyakan.

Efek pengganda pengeluaran pemerintah muncul akibat permintaan belanja pemerintah direspon oleh perusahaan dan dijadikan sebagai pendapatan, kemudian pendapatan perusahaan dijadikan sebagai dana untuk belanja perusahaan seperti belanja modal, belanja gaji dan sebagainya. Pendapatan dari gaji maupun modal dijadikan untuk konsumsi lagi konsumsi meningkatkan pendapatan perusahaan dan begitu seterusnya.

- Pengganda Pengeluaran Pemerintah

Belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi mengakibatkan pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah mendorong adanya kenaikan dalam pendapatan yang lebih besar, yaitu Y lebih besar dari G . Rasio Y/G disebut pengganda belanja pemerintah (*government-purchases multiplier*). Rasio ini menyatakan seberapa besar pendapatan meningkat dalam menanggapi kenaikan \$1 dalam belanja pemerintah. Implikasi dari perpotongan Keynesian adalah bahwa pengganda belanja pemerintah lebih besar dari 1. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5 :



Gambar 5. Kenaikan Belanja Pemerintah dalam Perpotongan Keynesian

Kenaikan belanja pemerintah sebesar G meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke B dan pendapatan meningkat dari Y_1 ke Y_2 . Kenaikan dalam pendapatan Y melebihi kenaikan belanja pemerintah G . Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak terhadap pendapatan.

Pengganda belanja pemerintah adalah $Y/G = 1 + MPC + MPC_2 + MPC_3 + \dots$

persamaan pengganda $Y/G = 1/(1 - MPC)$ (Mankiw, 2006).

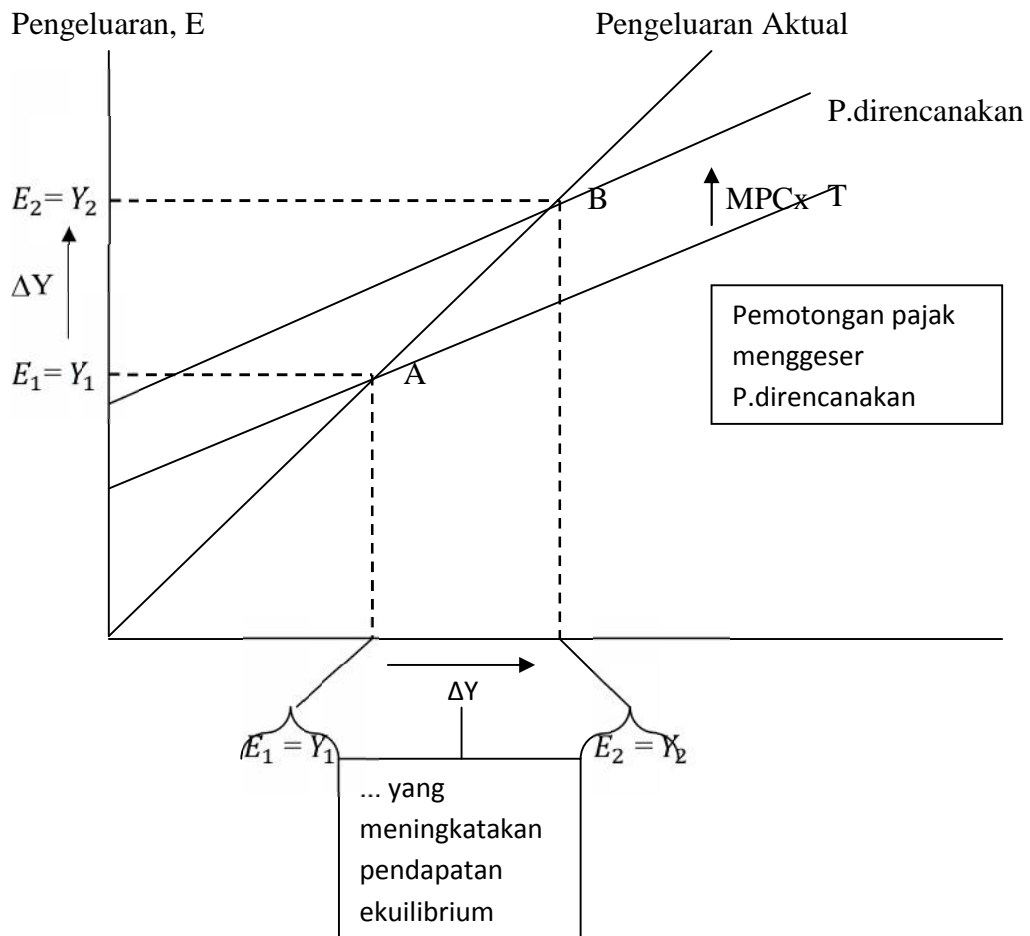
6. Teori Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan instrumen fiskal penerimaan perpajakan terhadap output juga dapat dijelaskan dalam teori perpotongan Keynesian. Efek pengganda yang muncul dari pemotongan pajak langsung direspon dengan meningkatkan pendapatan disposabel. Penurunan pajak sebesar T secara langsung akan menaikkan *disposable income* $Y - T$ sebesar T dan dengan demikian menaikkan konsumsi sebesar $MPC \times T$. Pada setiap tingkat pendapatan Y , pengeluaran yang direncanakan sekarang akan lebih tinggi. Seperti diperlihatkan pada gambar 6, kurva pengeluaran yang direncanakan bergeser ke atas sebesar $MPC \times T$. Ekuilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.

Sebagaimana kenaikan belanja pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan, begitu pula pengurangan pajak. Perubahan awal dalam pengeluaran, yang sekarang $MPC \times T$, dikalikan dengan $1/(1 - MPC)$. Dampak keseluruhan terhadap pendapatan dari perubahan pajak tersebut adalah

$$\Delta Y / \Delta T = - MPC / (1 - MPC)$$

Persamaan ini adalah pengganda pajak (*tax multiplier*), jumlah perubahan pendapatan yang disebabkan oleh perubahan sebesar \$1 dalam pajak.



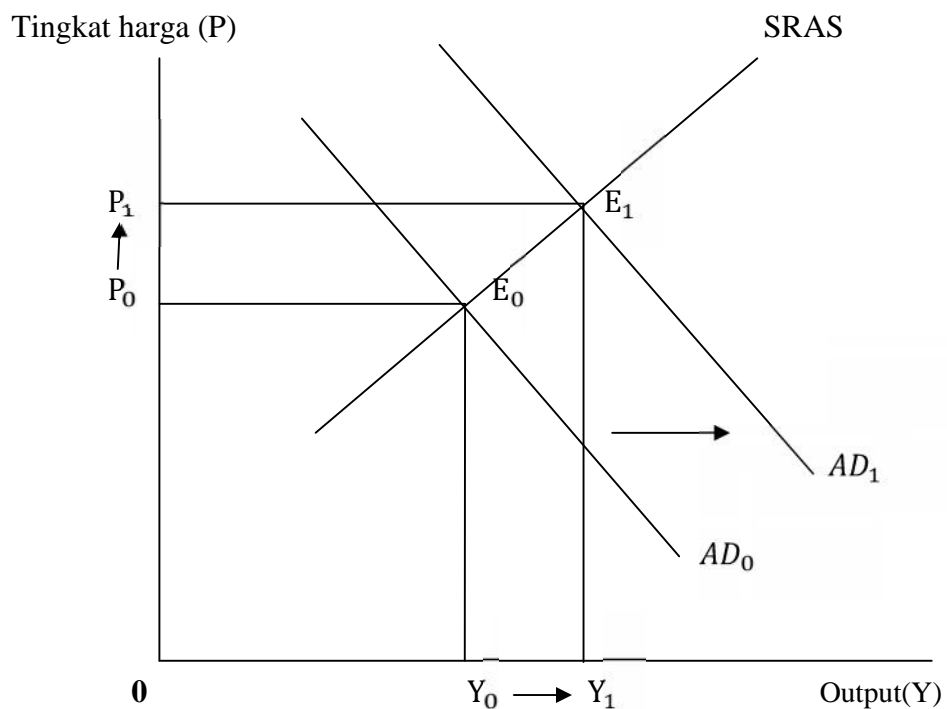
Gambar 6. Pengurangan Pajak dalam Perpotongan Keynesian

Pengurangan pajak sebesar T meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar $MPC \times T$ untuk setiap tingkat pendapatan. Ekuilibrium bergerak dari titik A ke titik B, dan pendapatan meningkat dari Y_1 ke Y_2 . Kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda terhadap pendapatan (Mankiw, 2006).

7. Teori Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi

Teori permintaan dan penawaran agregat Keynes dapat menjelaskan terjadinya inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh kelebihan permintaan terhadap penawaran barang dan jasa atau disebut dengan *demand pull inflation*. Inflasi tarikan permintaan atau disebut juga inflasi sisi permintaan (*demand side inflation*) atau inflasi karena guncangan permintaan (*demand shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.

Barang-barang menjadi berkurang dikarenakan pemanfaatan sumberdaya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya untuk mengimbangi permintaan yang semakin meningkat atau bertambah. Demand-pull inflation dapat dijelaskan secara grafik dan dapat dilihat pada gambar 7 :



Gambar 7. Inflasi dan Permintaan

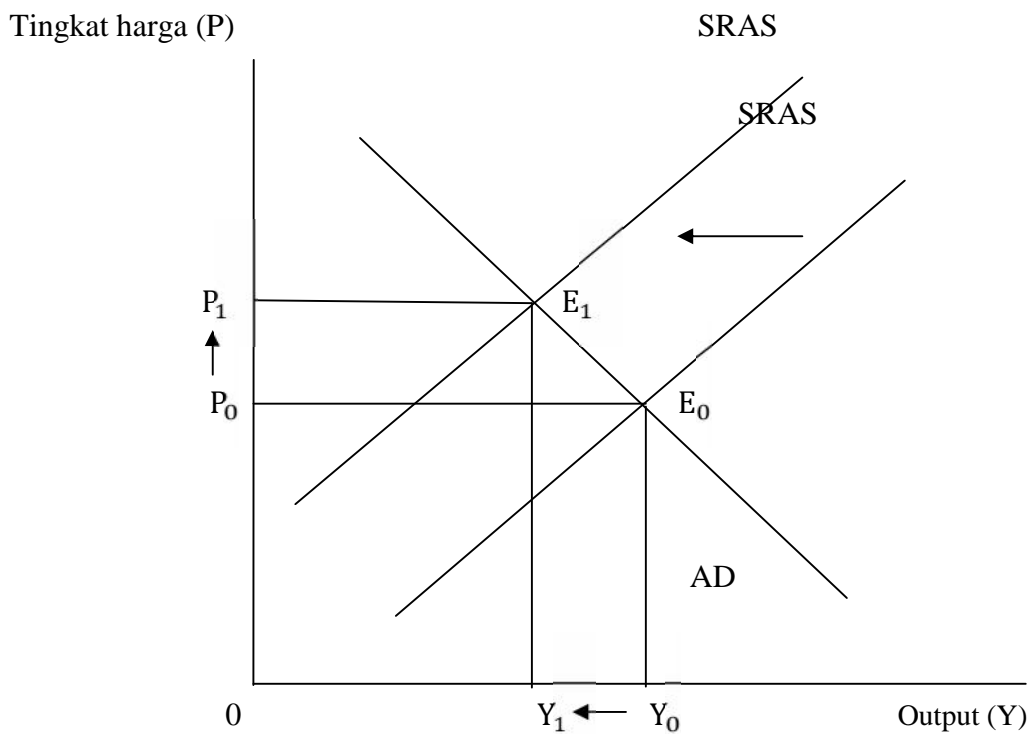
Dari gambar 7 ditunjukkan bahwa perekonomian mula-mula berada pada titik E_0 . Dengan kenaikan permintaan agregat (AD) dari AD_0 ke AD_1 , yang menyebabkan tingkat harga naik dari P_0 ke P_1 , dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dari titik E_0 ke E_1 . Dalam jangka pendek output naik dari Y_0 ke Y_1 (Nanga, 2005). Inflasi ini terjadi karena naiknya tingkat pendapatan masyarakat sehingga cenderung membeli barang dan jasa lebih banyak dari yang biasanya mereka konsumsi. Kebijakan fiskal ekspansif, kenaikan belanja pemerintah menstimulus peningkatan konsumsi agregat sedangkan disatu sisi kenaikan kapasitas produksi perusahaan terbatas dalam menghasilkan barang dan jasa sehingga menyebabkan kenaikan harga barang-barang.

8. Teori Penerimaan Pajak dan Inflasi

Teori kedua yang menjelaskan hubungan instrumen fiskal dengan inflasi adalah *cost push inflation*, yaitu kenaikan harga barang-barang yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi akibat adanya kenaikan dari faktor-faktor produksi itu sendiri. Kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif pajak tinggi sangat membebani kegiatan produksi, akibatnya dunia usaha mengurangi output produksinya. Berkurangnya penawaran sedangkan permintaan tetap pada akhirnya menjadi dasar terciptanya inflasi.

Inflasi dorongan biaya (*cost- push inflation*) atau juga disebut inflasi sisi penawaran (*supply- side inflation*) atau inflasi karena guncangan penawaran (*supply- shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa

mereka ke pasar. Dengan perkataan lain inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi atau pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumberdaya, atau inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atau lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikan. *supply-side inflation* secara grafik dapat dijelaskan pada gambar 8.



Gambar 8. Inflasi Dorongan Biaya

Dari gambar di atas, ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula berada di titik E_0 . Kemudian dengan adanya kenaikan biaya produksi yang menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) bergeser sepanjang kurva permintaan agregat (AD), yaitu dari $SRAS_0$ ke $SRAS_1$, telah mendorong perekonomian bergerak dari titik E_0 ke titik E_1 . Akibatnya harga naik dari P_0 ke P_1 dan sebaliknya output turun dari Y_0 ke Y_1 .

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Berto Muharman pada tahun 2013 tentang “Analisis Dinamis Pengaruh Instrumen Fiskal Terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari World Bank, Laporan Tahunan Nota Keuangan dan APBN, dan *Asian Development Bank (ADB)*, berupa data tahunan periode 1970- 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja negara dan pajak terhadap PDB dalam jangka panjang maupun jangka pendek dan juga untuk mengetahui pengaruh belanja negara dan pajak terhadap inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil empiris penelitian mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek belanja negara dan pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengaruh instrumen fiskal terhadap inflasi menemukan bahwa belanja negara dan pajak berpengaruh positif dalam jangka pendek sedangkan berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek pengaruh belanja negara lebih besar dibandingkan pajak dalam mempengaruhi PDB sedangkan jangka panjang pajak yang lebih berpengaruh dalam menaksir PDB. Belanja negara maupun pajak mempengaruhi inflasi dengan tingkat yang sama baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Danis Ardiyanto tahun 2012 tentang “Analisa Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto di Indonesia: Pendekatan *Vector Error Correction Model (VECM)*”. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan jangka waktu tahun 1969 sampai dengan 2011 yang diperoleh dari World Bank, Laporan Tahunan Nota

Keuangan dan APBN, dan *Asian Development Bank (ADB)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pengeluaran pemerintah per jenis pengeluaran dengan PDB dalam jangka pendek dan panjang. Penelitian ini menggunakan metode *vector error correction model*. Hasil penelitian ini adalah terdapat keterkaitan antara PDB dengan pengeluaran pembangunan dan PDB dengan pengeluaran rutin. Dalam jangka panjang PDB secara signifikan positif berpengaruh terhadap pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah (Periode 2001-2010)”. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data *time series* dan *cross section* atau yang disebut dengan data panel di empat kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan dasar perhitungan inflasi untuk propinsi Jawa Tengah oleh Bank Indonesia dari tahun 2001-2010. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah. Data-data digunakan tersebut meliputi data inflasi, tingkat bunga, kredit, DPK, PDRB, Penerimaan pajak, pengeluaran pembangunan dan bunga SBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Secara Parsial variabel pajak, dan dana pihak ketiga signifikan mempengaruhi inflasi sedangkan pengeluaran pembangunan, kredit, bunga, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, dan Kota Surakarta tidak signifikan terhadap inflasi. (2) Secara Parsial variabel pengeluaran pemerintah, kredit, Kabupaten Banyumas, dan Kota Tegal signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pajak,

dana pihak ketiga, bunga, dan Kota Semarang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Budi Trisnanto dengan judul “ Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi “. Penelitian ini melihat dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi serta melihat apakah terdapat diskresi kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya terhadap volatilitas output dan inflasi. Model Vector Error Correction Model (VECM) diaplikasikan atas data triwulanan, mencakup periode 1990 - 2009. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa shock kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara shock kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rezka Prakarsa Ardani, Joko Setiawan, Rida Perwita Sari dengan judul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Belanja

Pembangunan/Modal dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir “. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 1969 sampai dengan 2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pengujian dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tiga dekade terakhir.